

1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2016.

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase Jumlah Penyelesaian Perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan antara sisa perkara yang diputus tahun lalu dengan sisa perkara yang diputus tahun berikutnya.	Ketua/Hakim Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan antara perkara yang diputus tahun lalu dengan tahun berikutnya.	Ketua/Hakim Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan	Perbandingan antara penyelesaian perkara selama 5 bulan, yang diputus tahun lalu dengan tahun berikutnya.	Ketua/Hakim Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu.	Perbandingan antara perkara prodeo yang diterima dengan alokasi anggaran perkara prodeo	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum	Perbandingan antara perkara yang diterima dengan alokasi anggaran posbakum	Panitera Dan Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		Jumlah kegiatan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling	Perbandingan antara jumlah kegiatan sidang keliling yang dilaksanakan dengan alokasi anggaran	Panitera Dan Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

		Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website.	Perbandingan antara perkara yang diputus dengan upload putusan di website	Panitera Dan Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		Prosentase Pelayanan Meja Informasi	Perbandingan antara pemohon informasi dengan jumlah yang dilayani	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		Prosentase Minutasi Berkas Perkara	Perbandingan antara perkara yang diputus dengan perkara yang diminutasi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
2	Terselesaikannya Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel	Prosentase Proses Administrasi Penerimaan Perkara.	Perbandingan perkara yang diterima dengan penyelesaian administrasi penerimaan perkara	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		Prosentase Proses Pemeriksaan Perkara	Perbandingan antara perkara yang diterima dengan perkara yang diperiksa	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		Prosentase Proses Administrasi Putusan Perkara.	Perbandingan antara yang diputus dengan administrasi putusan perkara	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		Prosentase Proses Penyampaian Salinan Putusan kepada para pihak.	Perbandingan antara perkara yang diputus/diminta para pihak dengan salinan yang diserahkan kepada para pihak	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		Prosentase Penerbitan Akta Cerai	Perbandingan antara putusan cerai gugat yang telah berkekuatan hukum tetap dan perkara cerai talak yang telah diikrarkan dengan akta cerai yang telah diterbitkan	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		Prosentase Proses Penyampaian Akta Cerai kepada para pihak.	Perbandingan antara akta cerai yang diminta oleh para pihak dengan yang disampaikan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

3	Terwujudnya penyelesaian perkara melalui mediasi	Prosentase mediasi yang berhasil	Perbandingan antara jumlah perkara yang dimediasi dengan yang berhasil didamaikan	Ketua/Hakim Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan hasil mediasi.
4	Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat	Prosentase putusan yang tidak diajukan upaya banding.	Perbandingan antara putusan yang diajukan banding dari tahun sebelumnya dengan tahun berikutnya (dari tahun 2015 ke tahun 2016).	Ketua/Hakim Pengawas Panitera	Hasil Putusan
5	Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap	Prosentase pelayanan permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti.	Perbandingan antara permohonan eksekusi yang telah dilaksanakan atau telah dilayani pada tahun sebelumnya dengan tahun berikutnya (dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016)	Panitera	Hasil pelaksanaan Eksekusi
6	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efisien	Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	Perbandingan antara pengaduan yang diterima dengan yang ditindaklanjuti	Ketua/Hakim Pengawas Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
7	Terwujudnya pelaksanaan peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	Prosentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	Perbandingan antara Kinerja SDM yang menguasai bidang tugasnya dengan Kinerja SDM yang tidak mempunyai kemampuan dalam bidang tugasnya	Ketua/Wakil Ketua, Hakim Pengawas, Panitera dan Sekretaris	SKP dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai
8	Terwujudnya peningkatan kebersihan dilingkungan kerja dan kantor	Prosentase peningkatan kebersihan dilingkungan kerja dan kantor	Perbandingan antara jumlah petugas kebersihan kantor dengan jumlah ruangan serta halaman kantor yang dibersihkan	Ketua, Hakim Pengawas, Sekretaris dan Kasubag Umum dan keuangan	Pelaksanaan kebersihan dilingkungan kerja dan kantor.
9	Terwujudnya pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana kantor	Prosentase peningkatan pemeliharaan sarana prasarana kantor	Perbandingan antara jumlah anggaran yang tersedia dengan jumlah sarana prasarana yang dilakukan pemeliharaan	Ketua, Hawasbid, Sekretaris dan Kasubag Umum dan keuangan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
10	Terwujudnya ketertiban administarsi perpustakaan	Prosentase peningkatan administrasi perpustakaan	Perbandingan antara jumlah buku perpustakaan dengan anggaran yang ada	Ketua, Hawasbid, Sekretaris, Kasubag Umum dan Keuangan	Laporan Tahunan tentang buku perpustakaan

11	Terwujudnya peningkatan kedisiplinan pegawai	Prosentase peningkatan kedisiplinan pegawai	Perbandingan antara pegawai yang datang tepat waktu dan pulang tepat waktu dengan pegawai yang tidak tepat waktu	Ketua, Sekretaris, Kasubag Kepegawaain dan petugas absensi	Laporan Absensi setiap bulan untuk pengajuan uang makan dan remunerasi
12	Terwujudnya peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan /diklat secara tepat waktu	Prosentase peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan/diklat secara tepat waktu	Perbandingan antara sebelum dan sesudah pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan/diklat	Ketua, Wakil Ketua, Hakim Pengawas, Panitera dan Sekretaris	Hasil pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan/diklat
13	Terwujudnya peningkatan akses aplikasi untuk pelayanan perkara	Prosentase peningkatan akses aplikasi untuk pelayanan perkara	Perbandingan antara kemampuan daya kecapatan Internet dengan kecepatan akses aplikasi pelayanan perkara	Ketua, Wakil Ketua, Hawasbid, Panitera dan Sekretaris	Laporan kecepatan dan kemampuan akses aplikasi pelayanan perkara
14	Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi umum dibidang kesekretariatan	Prosentase peningkatan pelayanan administrasi umum dibidang kesekretariatan	Perbandingan antara jumlah pegawai yang menduduki jabatan di kesekretariatan dengan jumlah pegawai yang menduduki jabatan fungsional	Ketua, Wakil Ketua, Hawasbid, Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan Dan Laporan Bulanan menyangkut bidang kesekretariatan

2. Rencana Kinerja Tahun 2016

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.	1. Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu.	100 %
2.	Terwujudnya peningkatan penyelesaian peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.	2. Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	90 %
3.	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan	3. Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu.	100%
4.	Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan secara tepat waktu	4. Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu (perkara prodeo)	100%
5.	Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyankum secara tepat waktu.	5. Prosentase peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyankum secara tepat waktu.	100%
6.	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang diselesaikan dengan cara sidang diluar gedung dan diputus secara tepat waktu.	6. Prosentase peningkatan pelayanan perkara yang diselesaikan dengan cara sidang diluar gedung yang diputus	100%
7.	Terwujudnya peningkatan penyelesaian putusan/penetapan secara tepat waktu yang diunggah ke website	7. Prosentase peningkatan penyelesaian putusan /penetapan secara tepat waktu yang diunggah ke website	90%
8.	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan meja informasi.	8. Prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara.	100%
9.	Terwujudnya peningkatan penyelesaian minutasi berkas perkara tepat waktu.	9. Prosentase peningkatan kualitas dan kuantitas minutasi berkas perkara.	100%
10.	Terwujudnya peningkatan administrasi penerimaan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel.	10. Prosentase peningkatan penyelesaian administrasi / registrasi penerimaan perkara	100%

11.	Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, dan transparan	11. Prosentase persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	95%
12.	Terwujudnya peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel.	12. Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara.	100 %
13.	Terwujudnya peningkatan pelayanan penyampaian salinan / putusan tepat waktu.	13. Prosentase penyampaian salinan putusan / penetapan kepada para pihak tepat waktu.	100%
14.	Terwujudnya peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	14. Prosentase peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu.	100%
15.	Terwujudnya peningkatan pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu.	15. Prosentase peningkatan penyerahan akta cerai kepada para pihak.	100%
16.	Terwujudnya peningkatan pelaksanaan pengarsipan arsip perkara secara tepat waktu	16. Prosentase jumlah berkas perkara yang sudah masuk dalam box arsip perkara dengan yang belum masuk box	100%
17.	Terwujudnya peningkatan pelayanan mediasi.	17. Prosentase peningkatan pelayanan mediasi	100%
18.	Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat.	18. Prosentase putusan yang tidak diajukan upaya banding.	100%
19.	Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.	19. Prosentase pelayanan permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti.	100%
20.	Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat.	20. Prosentase peningkatan pengaduan yang ditindaklanjuti.	0%
21.	Terwujudnya pelaksanaan peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	21. Prosentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	100%
22.	Terwujudnya peningkatan kebersihan dilingkungan kerja dan kantor	22. Prosentase peningkatan kebersihan dilingkungan kerja dan kantor	100%
23.	Terwujudnya pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana kantor	23. Prosentase peningkatan pemeliharaan sarana prasarana kantor	100%
24.	Terwujudnya ketertiban administrasi perpustakaan	24. Prosentase peningkatan administrasi perpustakaan	100%

25.	Terwujudnya peningkatan kedisiplinan pegawai	25.Prosentase peningkatan kedisiplinan pegawai	100%
26.	Terwujudnya peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan /diklat secara tepat waktu	26.Prosentase peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan/diklat secara tepat waktu	100%
27.	Terwujudnya peningkatan akses aplikasi untuk pelayanan perkara	27.Prosentase peningkatan akses aplikasi untuk pelayanan perkara	100%
28.	Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi umum dibidang kesekretariatan	28.Prosentase peningkatan pelayanan administrasi umum dibidang kesekretariatan	100%

3. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI
SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : W13-A3/99/KU.01/SK/I/2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2017**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) pada Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun Anggaran 2016, perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
2. Bahwa berdasarkan DIPA Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP.DIPA-005-01.2.401369/2017 tanggal 07 Desember 2016, tersedia anggaran penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
3. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKJIP) Pada Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.
2. Keputusan Presiden RI Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004.
3. DIPA Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor : SP.DIPA-005-01.2.401369/2017 tanggal 07 Desember 2016.

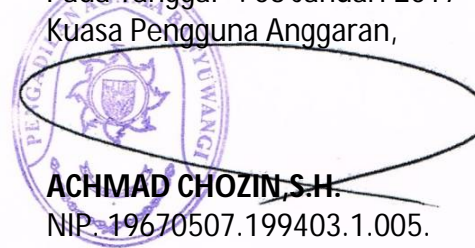
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2016, dengan susunan sebagai berikut :

No	Nama dan NIP	Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	H.Mudjito,S.H.,M.H. NIP. 19610620.198203.1.001.	Ketua	Pengarah I
2.	Drs.H.Moh.Khazin,M.Hes. NIP. 19620809.198903.1.002.	Wakil Ketua	Pengarah II
3.	Achmad Chozin, S.H. NIP. 19560507.199403. 1 005	Sekretaris	Ketua Tim Selaku Penanggung Jawab
4.	Bustami, S.H. NIP. 19570929.198003.1.004.	Panitera	Wakil Ketua
5	Fathurrohman NIP. 19610424.198703.1.002.	Kasubag Umum Dan Keuangan	Sekretaris
6.	Drs.Surib Wahyudi,S.H.,M.H. NIP. 19680721.199603.1.001.	Wakil Panitera	Anggota
7.	M.Wiyanto,S.H. NIP. 19610910.199003.1.002	Panitera Muda Hukum	Anggota
8.	Jaenal Abidin,S.H. NIP. 19590405.198903.1.004.	Panitera Muda Gugatan	Anggota
9.	Mohamad Arif Fauzi ,S.HI.M.H. NIP. 19780910.200604..1.004.	Panitera Muda Permohonan	Anggota
10.	Ali Akbar Prawiranegara,S.H. NIP.19750203.199503.1.002	Kasubag Kepegawaian,Organisasi Dan Tata Laksana	Anggota
11.	Arif Rahman,S.H. NIP. 19790402.200805.1.001.	Kasubag Perencanaan Teknologi Informasi Dan Pelaporan	Anggota
12.	Dini Herawati,S.E NIP. 19780917.201101.2.004.	Pejabat Pembuat Komietmen	Anggota
13.	Mamik Sulastri. NIP. 19671104.201405.2.001.	Bendahara Pengeluaran	Anggota

- Kedua : Tugas Tim adalah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2016.
- Ketiga : Segala keperluan untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) ini berupa : Bahan dan Konsumsi, yang dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Banyuwangi akun 521211 (Belanja Bahan) Tahun anggaran 2017.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada Tanggal : 03 Januari 2017
Kuasa Pengguna Anggaran,



ACHMAD CHOZIN, S.H.
NIP. 19670507.199403.1.005.